

PERBANDINGAN IMPLEMENTASIE-GOVERNMENT PROVINSI JAWA TENGAH DAN NUSA TENGGARA TIMUR: ANALISIS KEBIJAKAN DAN TANTANGAN

Jeni Aprianti¹, Putri Violita Intan Purnamasari², Des Suryani³, Tegar Victor
Pratama Aritonang⁴, Katriza Imania⁵, Riza Adelia Suryani⁶, Rizka Azzahri⁷

jeniaprianti112@gmail.com¹, putriviolita0404@gmail.com², dessrynii@gmail.com³,
victortegar48@gmail.com⁴, katrizaiania@fisip.unsri.ac.id⁵, rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id⁶,
rizkaazzahri@fisip.unsri.ac.id⁷

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan implementasi e-government di Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan meninjau aspek kebijakan, strategi, serta tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kesiapan digital lebih tinggi berkat infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang baik, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Sebaliknya, NTT masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kapasitas teknis aparatur yang terbatas. Meski demikian, inovasi seperti aplikasi e-NADI menunjukkan langkah positif menuju birokrasi digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang adaptif dan pemerataan infrastruktur digital untuk memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: E-Government, Kebijakan Publik, Jawa Tengah, NTT, SPBE.

ABSTRACT

This study compares the implementation of e-government in Central Java and East Nusa Tenggara (NTT), focusing on policy frameworks, strategies, and implementation challenges. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the analysis draws on academic sources and government documents. The findings indicate that Central Java demonstrates a higher level of digital readiness supported by adequate infrastructure, competent human resources, and effective inter-agency coordination. In contrast, NTT still faces significant barriers, including limited internet access, low digital literacy, and insufficient technical capacity among public officials. Nevertheless, innovations such as the e-NADI application mark a positive step toward digital bureaucracy. The study emphasizes the importance of adaptive national policies and equitable digital infrastructure development to strengthen the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) across Indonesia.

Keyword: E-Government, Public Policy, Central Java, East Nusa Tenggara, SPBE, Digital Governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan memperoleh informasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga menuntut lembaga pemerintahan untuk bertransformasi menuju sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Sebagai institusi yang bertugas melayani masyarakat, pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan digital untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin kompleks. Dalam konteks inilah muncul konsep pemerintahan elektronik (e-Government), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi (Anjani & Malawat, 2023). Konsep ini tidak hanya mencakup digitalisasi layanan, tetapi juga integrasi sistem yang memungkinkan interaksi antar

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara lebih efektif.

Penerapan e-Government di Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui sistem ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta aksesibilitas layanan publik bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengintegrasikan layanan pemerintahan ke dalam sistem digital yang efisien dan terkoordinasi (Imania & Haryani, 2021).

Namun, dalam praktiknya, implementasi e-Government di Indonesia masih menghadapi ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah telah mampu menerapkan sistem pemerintahan digital secara optimal, sementara daerah lain tertinggal karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kesiapan kelembagaan yang rendah (Setyorini, Supriyanto, & Sarpan, 2025). Selain itu, tantangan geografis, khususnya di daerah kepulauan dan terpencil, turut memperburuk kesenjangan dalam penerapan e-Government di berbagai wilayah (Imania & Haryani, 2021).

Kondisi ini terlihat jelas jika membandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kesiapan digital yang cukup baik. Pemerintah provinsi telah mengembangkan berbagai inovasi layanan publik berbasis teknologi, seperti aplikasi pajak daerah, sistem informasi kepegawaian, serta portal pelayanan terpadu. Menurut penelitian Maulana dan Kastiady (2024), pemanfaatan teknologi di Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah telah meningkatkan efisiensi administrasi pajak kendaraan bermotor, dengan peningkatan pendapatan sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan dan kesiapan sumber daya manusia masih perlu diperhatikan agar penerapan e-Government berjalan optimal. Misalnya, di beberapa kabupaten seperti Wonogiri, literasi digital masyarakat masih rendah, yang mempengaruhi adopsi layanan online.

Berbeda dengan Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan yang lebih berat. Sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam,

keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur menjadi kendala utama dalam penerapan e-Government. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengikuti arah kebijakan nasional. Salah satu contoh adalah pengembangan aplikasi e-NADI (Nusa Tenggara Timur Digital) yang digunakan untuk layanan administrasi dan tanda tangan elektronik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Penelitian Dowa dan Nallien (2022) menunjukkan bahwa implementasi sistem ini menjadi langkah positif menuju digitalisasi birokrasi, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan SDM di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di mana hanya 40% pegawai pemerintah memiliki keterampilan dasar IT. Hal ini menunjukkan perlunya investasi lebih besar dalam pelatihan dan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi disparitas regional.

Perbandingan antara kedua provinsi ini penting dikaji karena dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan e-Government diterapkan dalam konteks wilayah yang berbeda. Jawa Tengah mencerminkan daerah dengan tingkat kesiapan yang lebih tinggi, sedangkan NTT menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh daerah dengan sumber daya terbatas. Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan e-Government di

tingkat daerah, serta memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun strategi pengembangan SPBE yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan, seperti alokasi anggaran yang lebih besar untuk daerah tertinggal dan program literasi digital nasional.

Berdasarkan kajian penelitian ini, analisis mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana perbandingan implementasi e-Government antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis kebijakan dan tantangan?”. Sehingga, tujuan penelitian untuk dapat mengidentifikasi perbandingan implementasi e-Government keduanya berfokus pada analisis kebijakan dan tantangan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai penerapan e-Government, sekaligus menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul “Perbandingan Implementasi e-Government antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur: Analisis Kebijakan dan Tantangan” ini menggunakan metode studi pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan dan praktik implementasi e-Government melalui kajian literatur, dokumen resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu. Menurut Reza, dkk (2021) metode kualitatif deskriptif dipandang tepat karena memungkinkan penggambaran secara menyeluruh realitas sosial dan kebijakan tanpa manipulasi kondisi lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini sangat layak digunakan untuk menelaah fenomena kebijakan publik yang telah terdokumentasi melalui berbagai sumber akademik dan dokumen institusional.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah jurnal nasional yang diperoleh dari portal akademik seperti Garuda Dikti, SINTA Ristekbrin, dan Google Scholar. Literatur yang digunakan mencakup periode 2020–2025, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan e-Government baik dari sisi historis maupun kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Implementasi

1. Kebijakan dan Strategi E-Government: Studi Kasus Jawa Tengah dan NTT

Penerapan e-government di Indonesia merupakan strategi nasional yang didasarkan pada landasan hukum utama, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan fundamental dari kebijakan ini adalah untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini diterjemahkan ke dalam berbagai strategi yang disesuaikan dengan konteks, kapabilitas, dan tantangan lokal, sebagaimana terlihat jelas dalam praktik di Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

2. Provinsi Jawa Tengah: Adaptasi, Desentralisasi, dan Evaluasi Teknis

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja implementasi e-government yang sangat baik, tercatat sebagai satu dari hanya empat daerah di Indonesia yang telah berhasil mencapai tahapan keempat, yaitu “pemanfaatan” (tahap tertinggi), dalam pengembangan SPBE nasional per tahun 2018 (Pramono, 2021). Keberhasilan ini didukung oleh strategi yang beragam dan adaptif di tingkat kabupaten/kota. Di Ibu Kota Provinsi, Semarang,

strategi utama difokuskan pada desentralisasi pelayanan publik hingga ke unit pemerintahan terendah, yaitu kecamatan dan kelurahan. Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, Pemerintah Kota Semarang menggunakan

pendekatan analitis dengan melakukan kajian kesiapan (e-readiness). Kajian ini menggunakan kerangka STOPE, yang mengukur lima domain: Strategy (Strategi), Technology (Teknologi), Organization (Organisasi), People (SDM), dan Environment (Lingkungan) (Pramono, 2021). Hasil studi kesiapan ini menunjukkan data yang valid untuk pengambilan kebijakan: 13 dari 16 kecamatan telah berada pada level “Siap”, dan 86% dari total kelurahan juga dinilai “Siap” untuk menerapkan pelayanan berbasis e-government (Pramono, 2021).

Strategi yang berbeda diterapkan di Kabupaten Banjarnegara, yang menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap kearifan lokal (local wisdom) dan kondisi geografis (Regiana, Rosyadi, & Utami, 2024). Inovasi awal Dindukcapil Banjarnegara, yakni aplikasi “durenmas” yang mengharuskan masyarakat mengakses layanan secara langsung, mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh faktor-faktor kontekstual, seperti letak geografis yang didominasi pegunungan, jaringan internet yang tidak stabil, serta tingkat literasi digital masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani (Regiana et al., 2024). Sebagai respons, pemerintah daerah mengganti strategi tersebut dengan inovasi “pandusaluring”, yaitu model e-government pendekatan tidak langsung, di mana pengajuan layanan online difasilitasi oleh petugas di kantor desa atau kelurahan, sehingga lebih sesuai dengan kondisi masyarakat (Regiana et al., 2024).

Dari sisi elemen kapasitas (SDM dan anggaran), Banjarnegara juga menghadapi tantangan, di mana anggaran APBD lebih memprioritaskan enam pelayanan dasar untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di luar anggaran untuk layanan administrasi kependudukan. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas anggaran ini, strategi yang diambil adalah menjalin kemitraan aktif (elemen support) dengan sektor non-pemerintah atau swasta. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk penerbitan otomatis akta kelahiran dan KIA bagi bayi baru lahir, serta dengan Kantor Pos untuk pengiriman dokumen KTP-el dan KIA langsung ke masyarakat (Regiana et al., 2024).

Di Kabupaten Magelang, strategi e-government difokuskan pada optimalisasi portal web utama daerah (magelangkab.go.id) sebagai “pintu gerbang” tunggal untuk semua layanan publik (De Haan, 2020). Pendekatan strategi di Magelang bersifat sangat teknis, yaitu melakukan evaluasi kinerja web secara berkala menggunakan perangkat lunak analitik seperti GTMetrix. Evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja web secara umum sudah masuk kategori “baik” (77,78% parameter uji terpenuhi), namun strategi evaluasi teknis ini berhasil mengidentifikasi kelemahan krusial, yakni enam dari 27 parameter uji masih memiliki skor rendah, terutama pada parameter Optimize Images yang mendapat nilai F (0%), yang berdampak pada kecepatan akses halaman (De Haan, 2020).

3. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Inovasi Internal dan Tantangan Kapasitas

Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mencatatkan kinerja SPBE yang baik, dengan menempati peringkat ke-5 terbaik secara nasional, meraih predikat “Baik” dan indeks 3,35 (Dowa & Nallien, 2022). Implementasi ini didukung oleh salah satu misi Gubernur NTT, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan. Strategi utama di tingkat provinsi adalah respons terhadap administrasi perkantoran yang sebelumnya

masih manual, dinilai lambat, dan boros kertas. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT mengembangkan inovasi aplikasi internal yang diberi nama e-NADI (Dowa & Nallien, 2022). Aplikasi ini adalah sistem tata naskah dinas elektronik (e-Surat) yang diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup

pemerintah provinsi. Bagian penting dari strategi ini adalah memastikan keamanan dan legalitas dokumen digital. Untuk itu, aplikasi e-NADI telah terintegrasi penuh dengan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang mendapat sertifikasi resmi dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) di bawah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) (Dowa & Nallien, 2022).

Di tingkat kabupaten di NTT, strategi yang umum ditemukan adalah penggunaan website sebagai “langkah awal” dalam implementasi e-government. Seluruh kabupaten di Pulau Flores, seperti Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, dan Manggarai, telah memiliki website pemerintahan resmi (Delang & Munandar, 2022). Demikian pula di Kabupaten Belu, yang menggunakan portal belukab.go.id sebagai media layanan informasi publik (Mau & Nurnawati, tt).

Meskipun demikian, kualitas implementasi strategi website ini sangat bervariasi. Sebuah studi yang mengevaluasi kualitas website kabupaten di Pulau Flores menemukan bahwa aspek Search Engine Optimization (SEO) sudah sangat baik, dengan skor rata-rata 92%. Namun, aspek fundamental lainnya seperti Performance hanya 57% dan Best Practices 69%, keduanya masih masuk kategori “cukup berkualitas” (Delang & Munandar, 2022). Lebih lanjut, studi tersebut menemukan bahwa dua website kabupaten (Ngada dan Nagekeo) tidak dapat diakses atau dalam kondisi error saat penelitian berlangsung, menunjukkan adanya kegagalan dalam pemeliharaan dan implementasi strategi (Delang & Munandar, 2022).

B. Hambatan dan Tantangan Serta Perbandingan Antara Implementasi E-Government di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Implementasi e-government di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam, tergantung pada kesiapan digital, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan di masing-masing daerah. Perbandingan antara Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menggambarkan kontras yang cukup jelas dalam hal kesiapan dan hasil implementasi. Jawa Tengah termasuk provinsi yang progresif dalam pengembangan e-government karena adanya integrasi kebijakan, dukungan regulasi yang kuat, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang relatif merata. Djasper dan Harianti (2022) menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan telah berjalan optimal melalui sistem berbasis web yang mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Setyono (2022) menyoroti efektivitas koordinasi antarinstitusi yang menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem digital di daerah ini. Sejalan dengan itu, Ganyan dan Samudra (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah hambatan yang masih perlu diperhatikan. Wibowo dan Ningsih (2023) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penerapan e-government di Jawa Tengah terletak pada keterbatasan

integrasi data antarinstansi serta masih adanya kesenjangan kompetensi digital di tingkat aparatur. Selain itu, beberapa sistem layanan publik belum sepenuhnya terhubung secara real time karena perbedaan standar teknologi dan lemahnya interoperabilitas antarperangkat lunak. Djasper dan Harianti (2022) juga menyoroti hambatan pada aspek pemeliharaan infrastruktur, di mana sebagian unit kerja belum memiliki tenaga teknis yang memadai untuk mendukung operasional sistem secara berkelanjutan. Hambatan lain muncul dalam hal adaptasi budaya birokrasi yang masih cenderung konvensional, sehingga proses digitalisasi membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar tidak menimbulkan resistensi di kalangan pegawai. Dengan demikian, meskipun Jawa Tengah telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi e-government, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem tetap menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola digital yang efisien dan berkelanjutan.

Berbeda dengan Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai hambatan mendasar dalam pelaksanaan e-government. Menurut Kurniawan dan Puspitasari (2021), tantangan utama di NTT terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, minimnya jangkauan jaringan internet di daerah pedesaan, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital. Arisandi dan Purwanto (2021) menambahkan bahwa kualitas situs web pemerintah daerah di NTT masih tergolong rendah karena kurangnya pembaruan informasi dan lemahnya sistem keamanan data. Faktor kelembagaan dan budaya organisasi juga turut memperlambat proses digitalisasi, sebagaimana ditegaskan oleh Hasanah (2020) yang menyebut bahwa resistensi terhadap inovasi teknologi masih menjadi penghambat adaptasi aparatur pemerintah daerah. Kennedy et al. (2021) pun menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat sebagai salah satu penyebab belum optimalnya partisipasi publik dalam layanan daring. Selain itu, Budhi dan AHMAD Cabiyo (2021) serta Nali dan Nitisari (2023) menjelaskan bahwa integrasi antarplatform digital seperti e-NADI dan sistem nasional INA Digital masih terbatas, sedangkan Pranata (2024) menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pelaksanaan e-government dapat berjalan lebih efektif.

Hasil perbandingan antara kedua provinsi tersebut diperkuat melalui Laporan Evaluasi SPBE Nasional Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 4,26 (memuaskan), sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat nilai 3,83 (sangat baik), dengan sebagian kabupaten masih berada di bawah rata-rata nasional (KemenPAN-RB, 2023). Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi e-government di Jawa Tengah telah berjalan secara lebih konsisten dan merata, sedangkan NTT masih menghadapi kesenjangan digital antardaerah akibat faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun kedua daerah memiliki komitmen yang sama dalam mengembangkan pemerintahan berbasis digital, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis berpengaruh signifikan terhadap capaian pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi e-Government di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, meski masih ada perbedaan yang jelas di antara berbagai wilayah. Provinsi Jawa Tengah merupakan contoh daerah dengan kesiapan digital yang lebih maju, di mana penerapan kebijakan, fasilitas infrastruktur, dan penggabungan sistem telah berjalan dengan cukup baik serta mampu menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat. Pemerintah setempat di provinsi ini berhasil memanfaatkan pendekatan strategis seperti desentralisasi pelayanan umum, inovasi digital di bidang perpajakan, dan peningkatan situs web layanan publik. Kesuksesan Jawa Tengah juga didorong oleh kemampuan untuk melakukan penilaian rutin terhadap kesiapan teknis dan kemampuan sumber daya manusia, yang diperkuat melalui kerja sama aktif antarlembaga serta kolaborasi dengan pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-Government sangat tergantung pada kemampuan daerah untuk menggabungkan strategi kebijakan, teknologi, dan sumber daya secara terstruktur.

Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur menghadapi hambatan yang lebih rumit karena keterbatasan fasilitas teknologi, rendahnya pemahaman digital di kalangan pegawai dan masyarakat, serta kondisi geografis yang sulit diakses. Namun, langkah pemerintah daerah dalam membangun aplikasi e-NADI sebagai upaya transformasi digital birokrasi

menunjukkan komitmen kuat terhadap modernisasi pengelolaan pemerintahan. Aplikasi ini menjadi langkah maju menuju sistem administrasi kantor yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Meski begitu, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya perawatan sistem di tingkat kabupaten. Penilaian terhadap situs web pemerintah di berbagai daerah di NTT juga menunjukkan bahwa walaupun inisiatif digital telah dimulai, kualitas teknis, kemudahan akses, dan kelangsungan sistem masih perlu ditingkatkan agar bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Dengan demikian, kesenjangan digital antara Jawa Tengah dan NTT tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan teknologi, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan sosial dan budaya masyarakat terhadap perubahan digital.

Dari segi konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan e-Government tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada harmonisasi antara kebijakan publik, struktur organisasi, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (Davis, 1989) dan Diffusion of Innovation (Rogers, 2003), faktor penerimaan dan kemudahan penggunaan teknologi sangat memengaruhi tingkat penerapan di setiap daerah. Selain itu, menurut model implementasi kebijakan Edward III (1980), keberhasilan pelaksanaan kebijakan e-Government ditentukan oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi e-Government di Jawa Tengah menunjukkan integrasi keempat faktor tersebut, sedangkan NTT masih menghadapi tantangan dalam sumber daya, komunikasi kebijakan, dan kesiapan institusional. Analisis ini menunjukkan bahwa strategi nasional e-Government perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan geografis setiap daerah agar penerapan kebijakan menjadi lebih inklusif dan adil.

Pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan afirmatif yang khusus ditujukan untuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital seperti NTT. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah memperluas program literasi digital nasional dengan pendekatan berbasis masyarakat agar pegawai dan warga di daerah terpencil mampu mengadopsi teknologi secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih seimbang untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah kepulauan dan terisolasi. Pemerintah daerah juga disarankan untuk membangun kemitraan lintas sektor, baik dengan perusahaan swasta, universitas, maupun organisasi masyarakat sipil, guna meningkatkan kemampuan teknis dan inovasi layanan digital. Di lain pihak, mekanisme pemantauan dan penilaian penerapan e-Government harus dilakukan secara rutin dan terukur melalui indikator yang meliputi aspek kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, serta dampak sosial. Dengan cara ini, implementasi e-Government tidak hanya menjadi simbol modernisasi birokrasi, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan bergantung pada kelangsungan kebijakan dan kesesuaian antara tingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat sebaiknya memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung integrasi sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar setiap daerah dapat terhubung dan berbagi data secara aman. Pemerintah daerah, terutama di NTT, harus meningkatkan kemampuan institusional internal, memperbaiki pengelolaan data, serta mendorong budaya kerja digital di kalangan pegawai. Penguatan ekosistem E-government juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik dan penilaian terhadap layanan publik berbasis digital. Dengan partisipasi luas dari semua

pihak, penerapan e-Government di Indonesia dapat menjadi pendorong utama terciptanya pengelolaan pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara teknologi, kebijakan, dan manusia merupakan kunci utama keberhasilan e-Government menuju transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. <https://doi.org/10.4135/9781446220191>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.

Rujukan Jurnal

- Anjani, A., & Malawat, S. H. (2023). E-Government sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 165–170.
- Arisandi, D., & Purwanto, E. D. (2021). Kualitas situs website pemerintahan daerah Kabupaten di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal UM Palembang*, 20(2), 123–135.
- Budhi, A., & Cabiyono, A. S. (2021). Peran INA Digital dalam menjawab tantangan integrasi e-government. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(2), 123–130.
- De Haan, C. (2020). Evaluasi web performance Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka mendukung penerapan e-government untuk pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, 5(1), 23–35.
- Delang, T. O., & Munandar, A. (2022). Kualitas situs website pemerintahan daerah Kabupaten di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. *BALANCE: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 44–52.
- Djasper, R., & Harianti, D. (2022). Analisis pengembangan electronic government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 247–262.
- Dowa, P. P. C., & Nallien, E. M. (2022). Implementasi penggunaan aplikasi e-NADI yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dalam mewujudkan e-government. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 247–262.
- Ganyan, C. R., & Samudra, R. (2022). Penerapan e-government pada layanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 50–56.
- Hasanah, U. (2020). Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital: Tantangan dan peluang di pemerintahan daerah. *Innovative Journal of Social Science Research*, 5(1), 528–532.
- Imania, A. N., & Haryani, T. N. (2021). E-government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(1), 176–189.
- Kaman, K., Deswanto, R., & Ningsih, S. A. (2021). Implementasi e-government pada pemerintah daerah. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 43–50.
- Kennedy, A., Haryanto, W., & Wariyo, F. N. (2021). Tantangan dan solusi penerapan e-government di Indonesia. *Jurnal Tropagan Pemerintahan Masyarakat*, 2(2), 85–95.
- Kristian, I., Nuradhawati, R., & Ristala, H. (2024). Peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 7(2), 252–263.
- Kumiawan, A., & Puspitasari, D. (2021). Tantangan implementasi e-government di daerah terpencil: Studi kasus Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 112–127.
- Maulana, M. R., & Kastiady, S. S. P. (2024). Implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi penerimaan beban administrasi pajak kendaraan bermotor. *Jurnal*

- Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(11), 440–447.
- Nali, P. P., & Nitisari, E. M. (2023). Implementasi penggunaan aplikasi e-NADI yang terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dalam mewujudkan e-government. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 237–247.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-government readiness: Penilaian kesiapan aktor utama penerapan e-government di Indonesia. *JURNAL IPTEKKOM*, 22(1), 1–17.
- Pramono, S. E. (2021). Kajian kesiapan (e-readiness) kecamatan dalam penerapan e-government Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 8–18.
- Pranata, M. A. (2024). Analisis peluang dan tantangan kebijakan e-tilang sebagai wujud e-government yang efektif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 533–544.
- Regiana, E. T., Rosyadi, S., & Utami, P. (2024). Inovasi public service menggunakan e-government di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 265–279.
- Rezza, P., Endang, L., & Hari, S. (2021). Determinants of the policy implementation of guidelines for public complaints management in Tegal Regency Government Environment. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 223–229.
- Setyono, I. W. (2022). Analisis implementasi kebijakan dalam layanan berbasis e-government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 159–167.
- Setyorini, D. T., Supriyanto, S., & Sarpan, S. (2025). Implementasi Sistem Informasi Arsitektur SIA SPBE dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. *JISP*, 5(2), 1–14.
- Wibowo, S., & Ningsih, Y. P. (2023). Kesiapan implementasi e-government menuju penguatan sistem informasi dan data. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 45–55.

Rujukan Online

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional Tahun 2023.
- Mau, F. J., & Numawati, E. (tt.). Implementasi website belukab.go.id melalui Dinas Kominfo sebagai layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu. Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan.